

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Pada bab ini, peneliti menjelaskan kesimpulan dari penemuan yang ada di lapangan selama proses penelitian. Selanjutnya, peneliti juga akan memberikan rekomendasi yang dapat dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Parung agar dapat dijadikan referensi kedepannya dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang ada di Kecamatan Parung.

Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat kesimpulan yang peneliti dapat yakni sebagai berikut:

Pertama, ada tahap pertama rumusan masalah pemerintah menyadari bahwa ada tiga masalah yang ada dalam masyarakat khususnya tentang pelayanan publik. Sehingga perlu langkah strategi untuk mewujudkan RPJMD Kecamatan Parung 2018-2023, visi dan misi Kepala Daerah dan membuat sebuah program inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Tetapi dalam proses perumusan masalah pemerintah tidak menggandeng lembaga-lembaga lain untuk melakukan survey.

Kedua, aktor-aktor yang terlibat dalam proses agenda kebijakan adalah Camat diteruskan ke Sekretaris Camat lalu ke Kepala Bagian Seksi Bagian Umum dan Kepegawaian PLT Kepala Seksi Perekonomian dan Pembangunan Kecamatan Parung. Kemudian baru turun ke Kepala Unit Pelaksanaan Tugas Kecamatan Parung. Dalam tahap ini pemerintahan tidak menggandeng lembaga atau instansi di luar dinas pemerintah daerah dalam berkoordinasi, baik itu pengamat, masyarakat, DPRD, dan juga instansi vertikal.

Ketiga, tidak adanya alternatif lain. Dari awal sudah diduga trennya kedepan akan menggunakan pelayanan yang terdapat satu tempat. Namun alternatif kebijakan tersebut tidak disosialisasikan dan dikonsultasikan kepada masyarakat, maupun lembaga terkait sehingga tidak ada alternatif lain yang diharapkan lebih cocok bagi masyarakat yang bisa dibuat atau ditangkap dari orang-orang yang berada diluar pemerintah daerah.

Keempat, Dalam konteks politik, tidak melibatkannya agensi pemerintah, lembaga legislatif, dan kelompok kepentingan dalam proses formulasi kebijakan bisa menimbulkan sejumlah masalah. Pertama, hal ini dapat menyebabkan kurangnya representasi beragam kepentingan dalam kebijakan yang dihasilkan, mengingat peran penting yang dimainkan oleh aktor-aktor ini dalam mewakili berbagai sektor dan kelompok masyarakat. Kedua, tanpa partisipasi aktif dari berbagai aktor ini, proses pembuatan kebijakan mungkin tidak mencerminkan pemahaman yang luas dan beragam tentang isu yang dihadapi, sehingga menghasilkan solusi yang mungkin tidak efektif atau adil. Ketiga, tidak melibatkannya aktor-aktor ini bisa mengurangi legitimasi dan akuntabilitas kebijakan, karena masyarakat mungkin merasa tidak diwakili atau kebijakan tersebut mungkin tidak memenuhi standar pengecekan dan keseimbangan yang biasa ada dalam proses demokratis. Oleh karena itu, meskipun bisa lebih efisien dalam jangka pendek, pendekatan yang tidak melibatkan berbagai aktor ini pada akhirnya mungkin merugikan dalam hal kualitas, penerimaan, dan efektivitas kebijakan jangka panjang.

Kelima, peran aktor dalam formulasi kebijakan MAMI PAPI cenderung terpusat pada pemerintahan, terutama camat, dengan minimnya keterlibatan pihak swasta dan masyarakat. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang inklusivitas, partisipasi, dan distribusi kekuasaan dalam proses kebijakan tersebut. Dalam perspektif ilmu politik, penting untuk mempertimbangkan implikasi dari dominasi pemerintahan dalam formulasi kebijakan dan mencari cara untuk meningkatkan keterlibatan aktor-aktor lain dalam proses tersebut guna mencapai kebijakan yang lebih holistik, responsif, dan berkelanjutan.

keenam, Dalam konteks formulasi kebijakan Mall Mini Pelayanan Publik (MAMI PAPI) di Kecamatan Parung, peran camat sebagai aktor dominan dapat dianalisis menggunakan teori elite dalam ilmu politik. Teori ini mengusung ide bahwa sekelompok kecil orang, atau 'elite', biasanya memiliki kekuatan dan pengaruh yang signifikan dalam mengambil keputusan penting, termasuk dalam pembuatan kebijakan. Dalam hal ini, camat, sebagai pemimpin administratif tingkat kecamatan, dapat dianggap sebagai bagian dari elite ini. Peran dominan camat dalam proses pembuatan kebijakan MAMI PAPI dapat mencerminkan struktur kekuasaan ini, di mana keputusan utama dibuat oleh sekelompok kecil aktor yang memiliki akses dan pengaruh terhadap sumber daya kebijakan. Namun,

peran dominan ini juga dapat menimbulkan tantangan, seperti potensi untuk mengabaikan perspektif dan kebutuhan dari kelompok lain dalam masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi camat dan aktor lain dalam proses ini untuk berupaya mencakup berbagai perspektif dan kepentingan dalam formulasi kebijakan.

ketujuh, adapun faktor pendorong dari kebijakan yaitu solid dan kompaknya seluruh SKPD dalam mensukseskan program mall pelayanan publik tersebut. Selain itu kemauan dari pemerintah daerah sendiri yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah luas wilayah Kecamatan Parung yang menyulitkan untuk menjangkau seluruh masyarakat untuk ikut andil dalam program mall pelayanan publik. Kemudian tidak adanya anggaran yang disiapkan dalam anggaran sebelumnya. Dan yang terakhir kurangnya sosialisasi ke masyarakat sehingga masyarakat lebih banyak tahu adanya mall pelayanan publik dari mulut ke mulut.

5.2 Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, ada beberapa hal yang direkomendasikan kepada peneliti dalam memanfaatkan hasil penelitian tentang Formulasi Kebijakan Mall Pelayanan Publik di Kecamatan Parung. Adapun rekomendasi yang ditawarkan sebagai berikut:

- Pertama, mengidentifikasi permasalahan sedini mungkin, atau pemerintah terjun langsung ke masyarakat menanyakan apa keluhan dan permasalahan selama ini yang sering dialami.
- Kedua, seharusnya pemerintah menggandeng aktor-aktor lain diluar pemerintah itu sendiri baik dari masyarakat, pengamat, akademisi, DPRD, lembaga survey agar program atau kebijakan yang akan dijalankan berjalan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran.
- Ketiga, seharusnya pemerintah memiliki banyak alternatif-alternatif dalam pemecahan suatu masalah, kemudian alternatif tersebut ditujukan kepada masyarakat atau pengamat alternatif mana yang cocok atau yang bisa menjawab tantangan atau permasalahan kedepan.

- Keempat, meningkatkan kualitas peraturan yang sudah ada dari peraturan bupati menjadi peraturan daerah. Dengan adanya peraturan daerah maka setiap program atau kebijakan tidak mudah untuk diganti meskipun pemimpinnya berganti.
- Kelima, meningkatkan sumber daya manusia melalui reformasi birokrasi sehingga pemerintah mampu konsisten dalam memberikan inovasi-inovasi pelayanan yang bersentuhan langsung dengan rakyat sehingga manfaatnya akan bisa langsung dirasakan oleh warga Parung.
- Terakhir, ialah perlu meningkatkan sosialisasi dari pemerintah untuk masyarakat sehingga masyarakat semua mengetahui apa itu mall pelayanan publik. Dan juga Membuat website resmi MAMI PAPI sehingga ketika masyarakat ingin mengetahui apa saja yang dibutuhkan sebelum melakukan pelayanan sehingga masyarakat tidak perlu bolak-balik dari rumah ke Mall Pelayanan Publik hanya untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.